

# Global Public Goods (GPGs): Tinjauan Historis dan Penyertaan Civil Society

YULIDA PANGASTUTI

## Abstract

*This article will attempt to explore the political grounds for the development of GPGs by conducting an examination on two main ideologies, namely libertarianism and social democracy, which afterwards are developed for further implementations on the global level. GPGs, derived from the globalization of public goods, are considered as one of the idea that can solve the problem of unequal distribution, which characterizes the international world order today. This article will also explore the implementations of GPGs by embracing the role of civil society as one of the actor whose role should be taken into account in the GPGs decision-making.*

---

## PENDAHULUAN

Dunia internasional selalu berusaha menciptakan tatanan dunia yang lebih baik, hal ini diperlihatkan dari berbagai kesepakatan, piagam-piagam, ataupun organisasi-organisasi yang didirikan yang secara ideal bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Namun ironisnya, terkadang tujuan mulia itu kemudian hanya menguntungkan sebagian kelompok saja bahkan mendatangkan bencana bagi manusia. Kemiskinan masih membelenggu 1,2 milyar orang<sup>1</sup>, kurang lebih 150 juta anak-anak di negara berkembang dinyatakan kekurangan nutrisi dan makanan bergizi, dan sebanyak 1,1 milyar orang dinyatakan tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak<sup>2</sup>. Bahkan pelaksanaan hak untuk hidup bagi manusia pun tidak dapat terlaksana dengan baik: tercatat sepanjang abad ke-21, kurang lebih 35 juta jiwa manusia terbunuh dalam genosida<sup>3</sup>, dan 10 juta manusia tewas dalam Perang Dunia I dan II<sup>4</sup> (belum termasuk perang-perang 'kecil' seperti Vietnam, Korea, Teluk I dan II). Semua data-data ini menunjukkan kenyataan yang memilukan. Air bersih, pasokan makanan yang layak, serta hak untuk hidup yang seharusnya

merupakan *global public goods* (GPGs) tidak dapat dipenuhi walaupun dunia sudah dipenuhi berbagai aturan dan tatanan. Demonstrasi dan kerusuhan di kota Seattle dalam rangka menentang keberadaan WTO pada tahun 1999 merupakan sebuah momen yang menandakan ketidakpuasan dan keinginan besar akan adanya pembenahan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang lebih baik.

Konsep *global public goods* (GPGs) telah memberikan banyak harapan bagi manusia. Apakah harapan ini terlalu berlebihan? Atau justru menjadi sebuah tujuan penting yang harus dan mungkin dicapai?. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi analitis dengan diawali tinjauan filosofis dari akar konsep, identifikasi, dan mekanisme GPGs yang diharapkan dapat memperjelas makna '*public*' yang dikandung oleh GPGs yang direpresentasikan dengan peranan *civil society* dalam perwujudannya.

## DEMOKRASI SOSIAL: AKAR KONSEP GPGS

### Pertentangan Ideologi

Profesor Thomas Meyer dalam sebuah kuliah terbuka yang diadakan oleh PACIVIS FISIP UI pada awal April 2003 menyatakan bahwa terdapat tiga kekuatan ideologi yang berpengaruh besar dalam pembentukan tatanan politik baik nasional ataupun internasional. Ketiga ideologi tersebut adalah: fundamentalisme, libertarianisme, dan demokrasi sosial<sup>5</sup>.

Fundamentalisme adalah sebuah ide yang berangkat dari penggunaan keyakinan religius untuk menciptakan tujuan politik tertentu yang sifatnya tertutup secara politik, sosial, dan ideologi. Biasanya sifatnya radikal dan seringkali menghalalkan penggunaan kekerasan. Bagaimanapun juga, fundamentalisme melekat dalam setiap peradaban manusia. Fundamentalisme ini dapat diredam melalui instrumen demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh kelompok masyarakat.

Berbeda dengan fundamentalisme, libertarianisme dan demokrasi sosial sama-sama berakar pada tradisi liberalisme. Liberalisme ini berkembang dengan pesat pada abad pertengahan sampai dengan abad ke-17. Liberalisme sangat mempercayai pluralitas dan menempatkan individu sebagai aktor utama. Pada abad ke-18 terjadi perpecahan di tubuh liberalisme, dan muncullah paham libertarianisme dan demokrasi sosial. Perpecahan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai konsep penanganan pasar. Perpecahan semakin membesar pada abad ke-20 berkenaan

dengan terjadinya beberapa revolusi dan perang. Libertarianisme berpendapat pasar yang ideal adalah pasar yang bebas tanpa ada intervensi dari pemerintah dan kebebasan atas kepemilikan pribadi. Libertarianisme sangat antipati terhadap konsep power yang terkonsentrasi karena mengacu pada pernyataan Lord Acton bahwa *"power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely."* Pembatasan kekuasaan negara ini juga ditujukan untuk perlindungan hak-hak individu dan warga negara dari tekanan represi pemerintah. Mengenai dasar filosofi pasar bebas, Boaz menyatakan bahwa untuk bertahan dan berkembang individu membutuhkan aktivitas ekonomi. Pasar bebas merupakan perwujudan dari sistem ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu untuk menciptakan kekayaan. Bila diharuskan untuk menyebutkan kriteria *public goods*, maka libertarianisme hanya mengakui aspek-aspek yang berada di bawah kontrol pemerintah sebagai wujud *public goods*, yaitu pertahanan nasional, serta hukum dan perangkat regulasi yang berfungsi melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Ide libertarianisme ini ditolak oleh demokrasi sosial. Demokrasi sosial berpendapat bahwa perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang menjamin keterwakilan saja tidak cukup. Pasar yang bebas harus berada di bawah *visible hand*, yaitu kontrol pemerintah. Kontrol pemerintah ini diperlukan untuk menjamin adanya pemerataan distribusi kebutuhan manusia yang adil. Pasar yang 'tidak terkontrol' dikhawatirkan justru hanya semakin memperkaya individu yang kaya, dan semakin memurukkan kalangan miskin. Kenyataan ini pada akhirnya akan mengalienasi individu dari keterlibatannya

di politik, yang berarti menghambat pelaksanaan dan perlindungan HAM terhadap individu.

Untuk memastikan adanya pendistribusian yang merata, demokrasi sosial berpendapat bahwa harus terdapat barang atau jasa yang sifatnya penting yang dengan mudah dapat diperoleh oleh setiap individu. Konsep barang dan jasa ini disebut dengan *public goods*. Konsep *public goods* adalah salah satu karakter yang membedakan libertarianisme dengan demokrasi sosial. Libertarianisme menjadi paham yang paling berpengaruh dalam skala nasional ataupun internasional, terutama karena sifatnya yang radikal. Berada di kutub yang berlawanan dengan kutub otoritarianisme membuat libertarianisme menjadi lebih populer dibandingkan demokrasi sosial terutama di masa transisi. Pendapat ini dapat menimbulkan permasalahan besar, mengingat masyarakat yang otoriter cenderung 'tidak siap' untuk melakukan perubahan radikal yang berdampak pada semakin meningkatnya penggangguran karena adanya privatisasi dan pasar bebas.

Pada awalnya konsep *public goods* hanya dapat diterapkan pada lingkup nasional atau di dalam negara saja. Arus globalisasi yang menghapuskan batasan antarnegara, telah membuat pasar bebas yang dianut oleh libertarianisme semakin liar. Masyarakat dari negara-negara miskin semakin terpuruk dengan adanya privatisasi, persaingan yang tidak seimbang, dan yang semakin menjauhkan masyarakat dari barang dan jasa (*goods*) yang mereka perlukan untuk hidup.

## Demokrasi Sosial dalam Tataran Global

Poros kekuatan demokrasi sosial dipercaya berada di dataran Eropa, Inggris, serta Australia. Di Jerman, Willy Brandt telah mengemukakan idenya mengenai pemerintahan global di bawah pengaruh demokrasi sosial<sup>7</sup>. Di tengah dominasi paham libertarianisme, Brandt berharap bahwa munculnya demokrasi sosial ke tataran global akan membentuk *building blocks* dari sebuah tatanan politik ekonomi yang baru. Bentuk ini dapat dirintis dari diskusi dalam partai yang beraliran demokrasi sosial dan deklarasi progresif yang mempromosikan demokrasi sosial yang mengglobal. Bentuk-bentuk ini ditandai dengan elemen-elemen sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. pembentukan kewarganegaraan global dengan hak manusia yang mengglobal pula. Hal ini lambat-laun harus membentuk struktur-struktur yang mengefektifkan keberadaan hak-hak ini baik pada tingkatan global, lokal, nasional, makro regional, dan global;
2. penolakan fundamentalisme pasar neo-liberal dan penyusunan kembali peranan aktif dan bertanggungjawab dari pemerintah dalam arena transnasional. Dengan syarat prioritas terletak pada demokrasi global;
3. menghadapi globalisasi negatif yang sifatnya menghapus batasan negara melalui mekanisme globalisasi positif yang konstruktif dengan jalan membangun institusi-institusi politik, rejim, dan jaringan yang mengontrol pasar dan mengefektifkan penyediaan *global public goods*.
4. membangun sebuah kerangka pengaturan untuk perdagangan yang lebih sehat, dengan distribusi yang lebih adil dan lebih menekankan keterbukaan dan pengendalian pasar;

5. membangun kerangka ekologi bagi ekonomi global;
6. menghadapi ketidaksamaan dan kemiskinan oleh upaya yang dikoordinasikan oleh organ-organ internasional untuk menyediakan GPGs untuk semua masyarakat dunia;
7. membuat institusi-institusi pemerintahan global yang ada menjadi lebih inklusif, lebih adil dan lebih demokratis; dan,
8. mengintensifkan, memperpanjang serta mendemokratisasikan pilar-pilar yang terkait dalam pemerintahan global.

Martin Shaw mengemukakan bahwa demokrasi sosial harus melakukan advokasi agenda-agenda 'sosial' untuk pembangunan demokrasi global dengan melibatkan kerangka dari ekonomi, sosial, lingkungan yang diharapkan mengatasi perbedaan struktural yang mendalam<sup>9</sup>.

## GLOBAL PUBLIC GOODS (GPGS): IDENTITAS DAN MEKANISME

### Karakter GPGs

Menurut Inge Kaul dan et.al., untuk mengidentifikasi GPGs kita harus memilah-milah makna yang dikandung oleh GPGs itu sendiri. Cara terbaik dan termudah adalah dengan membedakan makna privat dan publik. Publik, masih menurut Kaul dan et.al., adalah keadaan alami dari kebanyakan hal. Seperti yang kita ketahui, di masa awal manusia belum mengenal hak kepemilikan. Berkebalikan dengan publik, privat sifatnya adalah temuan dan buatan manusia.

Untuk menelaah GPGs dari sisi filosofis kita bisa melihat konsep GPGs yang telah

ada sejak kekaisaran Romawi di bawah Julius Caesar. Pada saat itu GPGs dikenal dengan istilah *res publica* (*public things* atau hal-hal publik)<sup>10</sup>. Bagi Caesar, makna domain publik adalah lingkup situasi yang mempengaruhi semua orang, termasuk agensi yang dipercaya oleh publik sebagai pengatur masalah-masalah publik. Inilah asal-muasal dikenalnya kedaulatan, yaitu negara diminta oleh masyarakatnya untuk mengatur dan menjaga hak-hak yang dimiliki masyarakat<sup>11</sup>. Peran negara inilah menjadi legitimasi atas keberadaan *visible hand* dalam pengaturan pasar dalam demokrasi sosial; bertentangan dengan konsep *invisible hand* yang kemudian dikemukakan oleh Adam Smith.

Makna *public goods*, seringkali disamakan dengan sosialisme dalam artian komunisme yang erat dengan penghapusan hak-hak individu, ketiadaan kepemilikan pribadi, dan dengan demikian memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM oleh negara. Berbeda dengan komunisme, kata-kata '*public*' dalam '*public goods*' tidak hanya berarti publik dalam segi konsumsi, namun juga berarti barang ini dihasilkan oleh publik, sehingga tidak tersentralisasi pada negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa *global public goods* bersifat publik dalam dua hal, *pertama* publik dalam artian bukan pribadi (*private*); dan *kedua* publik dalam artian melebihi batasan-batasan negara<sup>12</sup>.

Sebuah benda atau jasa disebut *public goods* bila ia memenuhi kriteria-kriteria dari *public goods* itu sendiri. Karakter yang membedakan *global public goods* dari yang lainnya adalah terpenuhinya dua prinsip utama: *non-rivalry* dan *non-excludability*. *Non-excludability* adalah kemampuan dari *public good* untuk menghasilkan keuntungan yang mustahil

mengesampingkan setiap orang untuk menikmatinya. Sedangkan *non-rivalry* adalah keadaan di mana konsumsi atas suatu barang oleh satu orang tidak berarti mengurangi konsumsi bagi orang lain<sup>13</sup>, contohnya perdamaian, lapisan ozon, dan air. Sandler<sup>14</sup> menambahkan karakter ketiga yaitu tindakan di mana kontribusi menentukan penyediaan agregat (agregat teknologi), yang mempengaruhi kemungkinan pembiayaan GPGs.

Kaul, Gurnberg dan Stern mengingatkan pentingnya memperhatikan eksternalitas, baik positif ataupun negatif<sup>15</sup>. Menurut pakar ekonomi, penentuan positif atau negatif dari suatu eksternalitas ditentukan dari kegunaan yang dikandung oleh pihak ketiga (publik). Eksternalitas negatif muncul ketika seorang individu atau perusahaan mengambil tindakan namun tidak ikut merasakan dampak atau biaya yang seharusnya ia keluarkan, contohnya pencemaran sungai oleh limbah pabrik. Sementara eksternalitas positif adalah kebalikannya, ketika seorang individu tidak bisa ikut merasakan keuntungan dari sebuah tindakan, misalnya pendidikan perempuan berdampak positif terhadap kemampuan bertahan seorang anak dan memperlambat laju pertumbuhan penduduk.

Karakteristik GPGs yang lainnya adalah 'generasi', diambil dari perspektif lingkungan terutama berdasarkan laporan dari komisi Brundtland: "*Our Common Future*"<sup>16</sup>. Idealnya, seluruh aspek kemanusiaan seharusnya dapat memperoleh keuntungan dari adanya mekanisme GPGs. Namun hidup seseorang hanya terbatas pada suatu rentang waktu saja. Dengan demikian, penting untuk memahami makna kemanusiaan. Komisi Brundtland ini menelurkan konsep

pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya menurut Sandler adalah penggunaan energi nuklir; ia bisa meningkatkan kebutuhan energi pada masa sekarang, namun dalam jangka panjang akan muncul sampah-sampah nuklir yang berbahaya bagi generasi mendatang.

### Produksi GPGs

GPGs dapat dibentuk dalam dua tipologi. *Pertama, final GPGs* yang menekankan pada *outcome* dibandingkan keberadaan *goods* itu sendiri dalam konsep standar. Bentuk GPGs ini bisa tak terukur (seperti lingkungan atau sejarah atau warisan bersama seluruh umat manusia); dan *kedua, intermediate GPGs*, yang mengacu pada tatanan dan regulasi, seperti rejim, yang berkontribusi terhadap ketersediaan *final GPGs*. Misalnya GPGs dalam bentuk pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari *input* publik dan privat. Rejim bertanggung jawab dalam mengatur kombinasi keduanya.

Biaya produksi GPGs ini ditentukan oleh ongkos yang dikeluarkan dalam hal<sup>17</sup>: (a) penelitian yang berfungsi untuk menganalisis dasar-dasar prosedur penyediaan GPGs misalnya bagaimana konsep keberlanjutan mempengaruhi mekanisme kebijakan alternatif penyediaan GPGs; (b) koordinasi atau penentuan prioritas, tinjauan kemajuan, mobilisasi sumber daya, alokasi dana, dan pengawasan tingkatan kontribusi; (c) implementasi, yaitu bagaimana mengorganisasikan institusi baru atau institusi yang sudah ada, proses-proses legislatif, dan mekanisme pengaturan serta

kerangka kebijakan yang dikeluarkan. Dalam penyediaan GPGs terdapat proses yang menitikberatkan pada dua dimensi. *Pertama*, pengambilan keputusan politis di mana *stakeholders*-lah yang memutuskan barang atau jasa manakah yang paling dibutuhkan, bagaimana memproduksinya, dan bagaimana mendistribusikan keuntungan yang diperoleh. Dimensi yang *kedua* adalah dimensi produksi yang merupakan hasil keputusan politis yang diimplementasikan. Proses ini terdiri atas dua bagian, yaitu pembiayaan dan manajemen. Pembiayaan adalah usaha-usaha yang ditempuh untuk memunculkan alokasi sumber daya yang layak—privat ataupun publik—dalam lingkup GPGs; sementara manajemen lebih mengacu pada strategi yang diambil dalam mengawasi produksi dan memastikan barang-barang produksi tersebut sampai ke pengguna dengan utuh, efektif dan efisien<sup>18</sup>.

### Pembiayaan GPGs

Mengingat sifatnya yang global, tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama internasional merupakan kunci terpenting dalam produksi GPGs. Bila di tataran nasional-domestik, *public goods* dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dengan menggunakan pajak sebagai senjata utama, di tataran internasional situasinya sangat jauh berbeda. Ketiadaan organ supranasional sangat mempengaruhi hal ini. Setidaknya terdapat enam metode yang dapat diaplikasikan dalam proses pembiayaan GPGs, yaitu subsidi, kompensasi, *user fees and charges*, *direct payment*, *new property rights and markets*, serta regulasi<sup>19</sup>.

Arhin Tenkorang dan Conceiao menekankan pada pentingnya subsidi<sup>20</sup>. Dalam kasus peningkatan kesehatan global,

subsidi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan riset dan pembangunan yang terkait dengan isu ini. Riset ini memiliki relevansi yang kuat pada negara berkembang dan tidak akan dapat terjadi tanpa adanya metode subsidi. Ilustrasi lebih lanjut subsidi termasuk berbagai variasi pembayaran, biasanya dalam bentuk dana bantuan. Inisiatif subsidi ini sangat vital dalam mengintegrasikan pasar lintasteritori.

Metode kompensasi menekankan pada pertimbangan biaya eksternalitas. Kompensasi digunakan atas penggunaan fasilitas lingkungan global untuk tujuan-tujuan seperti konservasi keragaman hayati dan pengurangan emisi karbon. Tipe pembayaran ini kebanyakan ditujukan kepada negara-negara berkembang sebagai pembayaran atasbiaya yang mereka harus keluarkan dalam menyediakan jasa lingkungan global yang hampir mustahil mereka lakukan sendiri bila hanya berdasarkan kepentingan nasional mereka saja.

Metode yang ketiga adalah *user fees and charges* yang ditarik dalam situasi yang berbeda-beda. Sistem ini hampir mirip dengan sistem royalti, misalnya para penandatanganan perjanjian internasional tentang *Plant Genetic Resource for Food and Agriculture* harus membayar ketika mereka mengambil material genetik dari sistem multilateral ini. Sistem yang keempat adalah metode pembiayaan yang sangat klasik, yaitu iuran dalam bentuk pembayaran langsung dalam rangka membiayai GPGs. Pembiayaan ini dapat dilakukan di organisasi-organisasi internasional seperti yang terdapat dalam sistem PBB, dan organisasi-organisasi lainnya.

*New property rights and market* seperti yang dijelaskan oleh Castro dan Cordero adalah dengan memberikan harga yang adil dan efisien bagi komoditas-komoditas baru yang berguna bagi suplai GPGs, misalnya dalam kasus reduksi CO<sub>2</sub>. Cara yang terakhir adalah melalui regulasi. Seperti yang telah dijelaskan, 'soft' regulasi mungkin adalah cara yang paling sering digunakan untuk meningkatkan alokasi sumber daya untuk GPGs. Namun biasanya regulasi ini berdasarkan pada perjanjian internasional yang tidak mengikat yang hanya bisa meminta negara-negara untuk mematuinya. Bentuk perjanjian dan regulasi ini menurut Berrett kurang efektif karena ketiadaan insentif.<sup>21</sup>

Todd Sandler yang menekankan pada metode agregasi teknologi untuk mengatasi suplai dari GPGs berpendapat setidaknya terdapat empat cara untuk memastikan pemenuhan GPGs, yaitu (1) *summation* atau pengumpulan kontribusi yang mencukupi kebutuhan akan suplai *public goods*. Strategi ini memiliki kelemahan karena seringkali dikarakteristikan dengan adanya bentuk *prisoner's dilemma* atau *free riders*. Strategi ini membutuhkan organisasi multilateral dengan kepemimpinan dari negara-negara kaya untuk mencukupi kebutuhan *public goods*; (2) *weakest link*, adalah metode untuk memastikan suplai GPGs telah terpenuhi dengan menguji pada titik terlemah. Misalnya untuk memastikan suplai air bersih tercukupi, cukup dengan menguji dan mengamati distribusi air bersih di negara-negara atau kawasan-kawasan yang paling rawan akan air bersih; (3) 'best-shot' sebagai metode ketiga yang menekankan bahwa kontribusi sebesar-besarnya menentukan level agregat GPGs yang tersedia untuk konsumsi. Contohnya ketika menemukan penawar AIDS, malaria, ataupun penyakit lainnya usaha yang

terbesarlah yang paling mungkin membawa keberhasilan dalam menanggulangi penyakit-penyakit tersebut; dan, (4) mirip dengan metode kompensasi yang ditawarkan Kaul, metode *weighted sum* juga mencerminkan pembagian keuntungan yang tidak setara, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya dalam kasus pembasmian wabah pes di suatu negara tentu akan menguntungkan negara yang kebetulan terletak lebih dekat dan kurang menguntungkan negara-negara yang letaknya lebih jauh.

### Realitas Pelaksanaan GPGs

Seperti yang disebutkan di bagian awal tulisan ini, di dunia politik baik nasional ataupun global, ideologi yang mendominasi adalah libertarianisme yang menekankan pada kebebasan pasar. Demokrasi sosial yang menjadi motor penggerak konsep GPGs adalah ideologi yang kalah populer. Meyer mengatakan bahwa memang dalam kerangka diskusi, atau forum-forum internasional ide mengenai demokrasi sosial dengan tujuan penciptaan GPGs sangat dominan, namun tidak dalam kenyataan realisasi politiknya<sup>22</sup>. Seperti yang dikemukakan oleh Presiden ECOSOC, Francesco Paolo Fulci, telalu banyak konferensi-konferensi PBB dan puluhan deklarasi sejak tahun 1990-an, namun hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah tindakan-tindakan yang lebih konkret dan sedikit bicara<sup>23</sup>.

Rejim-rejim dengan semangat libertarianisme seperti IMF atau pun WTO memang telah berhasil melepaskan banyak sistem ekonomi negara-negara miskin dari cengkeraman ekonomi otoritarianisme, namun sayangnya rejim-rejim ini justru mendatangkan permasalahan besar bagi negara-negara tersebut, karena

ketidaksiapan dalam menghadapi arus pasar bebas dunia yang demikian kuat. Keadaan ini menjadi pemicu fenomena pelebaran kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin.

Negara-negara dengan hutang besar seperti Afrika harus merelakan lebih dari 60% dari pendapatan ekspor mereka untuk membayar bunga hutang. Tercatat total hutang eksternal dari negara-negara berkembang mencapai lebih dari dua trilyun dolar, dan dari hutang sebesar ini sekitar 216 milyar dolar tidak dapat dibayar oleh negara-negara ini. Hutang dengan jumlah sangat besar ini terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah karena berdasarkan perhitungan dari PBB dan Bank Dunia, lebih dari 1 sampai 1,3 milyar orang hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan harian kurang dari satu dolar. Jumlah penduduk yang mengalami malnutrisi di negara berkembang mengalami peningkatan dari 822 juta menjadi 828 juta.<sup>24</sup> Secara struktural, rejim-rejim seperti IMF juga menerapkan peraturan yang 'memihak' negara-negara kaya, seperti yang terlihat dari ketentuan Special Drawing Rights (SDR) yang sangat menentukan pengambilan keputusan di tubuh IMF. Cina, negara kedua terbesar bila diukur dari *purchasing power parity* harus berada di bawah negara sekecil Belanda dan hampir disamakan dengan Belgia. Sementara itu negara sekecil Belgia memiliki kuota 52% lebih besar dari Brazil dan 78% lebih besar dari Meksiko. Bahkan secara persentase 24 negara industri menguasai 61,4 persen dari keseluruhan kuota SDR ini. Dapat dikatakan bahwa nasib negara-negara 'kecil' sangat bergantung pada kebijakan negara-negara kaya, padahal pembangunan ekonomi dan kestabilan moneter merupakan salah satu

bentuk dari GPGs.

**Tabel 1**  
**Kuota IMF dan GNP**

Negara	Kuota, Efektif Januari 1999 (milyar US\$)	<i>Purchasing power Parity</i> GNP, 1998 (milyar US\$)	GNP 1998 (milyar US\$)
Federasi Rusia	5.945	580.3	337.9
Negeri Belanda	5.162	339.3	388.7
Cina	4.687	3,983.6	928.9
Belgia	4.607	239.7	259
Swiss	3.458	189.1	284.8
Brazil	3.036	1,021.4	758
Meksiko	2.586	785.8	380.9
Denmark	1.643	126.4	176.4
Republik Korea	1.634	569.3	369.9

Sumber : Ariel Buira, *The Governance of the International Monetary Fund*, dikutip oleh Kaul, et.al.<sup>25</sup>

**Tabel 2**  
**Distribusi Kuota IMF berdasarkan Kelompok Negara, 2001**

KELOMPOK NEGARA	Special Drawing Rights (Juta US\$)	Total Pembagian (%)
24 negara industri	130,567	61.4
Negara pengekspor minyak	20,307	9.6
Negara non-eksportir minyak	61,527	29.0
<b>Total</b>	<b>212,401</b>	<b>100.0</b>

Sumber : Ariel Buira, "The Governance of International Monetary Fund," dalam Kaul, et.al<sup>26</sup>.

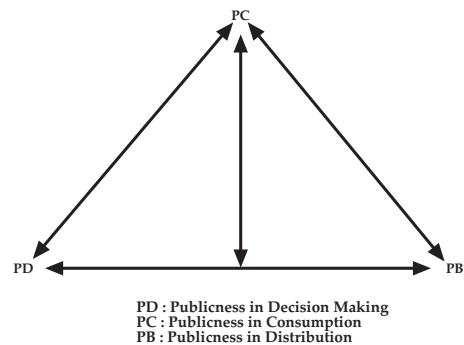
Keberadaan GPGs semakin dipertanyakan terutama dalam menghadapi globalisasi. Menurut Kenneth Waltz<sup>27</sup>, globalisasi dapat diartikan sebagai proses homogenisasi dalam bentangan suatu budaya yang semakin menyerupai satu sama lainnya. Namun, dampak globalisasi tersebut justru seringkali berupa ketidaksetaraan atau ketidaksamarataan.<sup>28</sup> Waltz kemudian

menambahkan bahwa proses globalisasi telah meninggalkan negara seperti hampir semua negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Rusia, seluruh jazirah Timur Tengah kecuali Israel, dan sebagian besar Asia. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa lebih banyak negara yang dirugikan dibandingkan yang diuntungkan, dan sayangnya negara-negara yang merugi justru adalah negara-negara yang seharusnya mendapatkan keuntungan yang besar bagi perbaikan negaranya. Seperti yang dikemukakan oleh Linda Weiss, pada tahun 1991, sebesar 81% dari stok *foreign direct investment* (FDI) justru berputar di negara-negara Utara seperti Inggris, Jerman dan Kanada<sup>29</sup>, sementara kurang lebih 140-an negara lainnya harus memperebutkan 19% sisa dari FDI yang ada.

### **PUBLICNESS: HARAPAN PENYELESAIAN**

Mekanisme GPGs yang ideal adalah dengan mempertahankan makna publik dalam operasinya. Hal ini tidak berarti GPGs anti terhadap sektor *private goods*, karena tidak dapat dipungkiri sebagian besar GPGs justru didukung oleh kehadiran dari *private goods* ini. Dengan mempertimbangkan keberadaan *private goods* dan sifat dasar dari makna publik yang diembannya, seharusnya GPGs bersifat publik dalam hal konsumsi, distribusi keuntungan, dan dari proses pengambilan keputusan. Ketiga sifat *public* inilah yang kemudian membentuk segi tiga GPGs<sup>30</sup>.

**Bagan 1**  
**Segitiga Global Public Goods (GPGs)**



Sumber : *Providing Global Public Goods*<sup>31</sup>

*Publicness* dalam konsumsi merupakan tujuan terpenting, namun pada kenyataannya publik secara keseluruhan belum dapat mengkonsumsi GPGs, karena kekurangan *publicness* dalam distribusi keuntungan. Tentu kenyataan ini sangat dipengaruhi oleh aspek *publicness* lainnya, yaitu *publicness* dalam pengambilan keputusan. Permasalahan GPGs ini dianggap sebagai masalah di luar jangkauan atau melewati batasan-batasan wilayah suatu negara, sehingga dalam proses pengambilan keputusan, negaralah yang menjadi aktor dominan. Menurut studi yang dilakukan oleh Alger<sup>32</sup>, negara ketika berhadapan dengan negara lainnya di dunia internasional memiliki kecenderungan untuk semakin menjauhi kenyataan pada tataran lokal, bahkan di negara yang demokratis sekalipun pengambilan keputusan cenderung berpusat pada elit-elit yang sangat terbatas. Begitu juga dengan *inter-governmental organization* (IGO) yang merupakan perpanjangan kebijakan luar negeri negara. Padahal pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan global melibatkan dan berdampak pada kesertaan lapisan-lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan terbawah (*grass-roots*), sehingga efektivitas penerapan

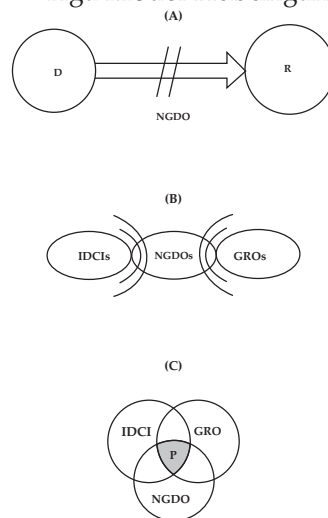
kebijakan tersebut sangat bergantung pada legitimasi pada pengetahuan dan penerimaan dari masyarakat tersebut.

Kaul, et.al., menerjemahkan publik sebagai *civil society* yang mulai dari tingkat bawah sampai dengan pergerakan di lingkup internasional dalam bentuk NGOs baik tingkat lokal ataupun internasional (*international non-governmental organizations*, INGOs). Sementara, Chadwick berusaha memperlihatkan distribusi sumber daya dari berbagai NGOs, termasuk didalamnya adalah hubungan antara Utara dan Selatan dalam konteks NGOs. Menurut Chadwick, NGOs sekalipun memiliki kecenderungan yang sama dengan aktor negara, semakin mereka dekat dengan dunia internasional maka mereka memiliki potensi untuk semakin menjauhi kenyataan tataran lokal.

Mario Padron<sup>33</sup>, seorang pakar pergerakan sosial dari Peru membentuk tiga tipologi NGO yang aktif dalam proses pembangunan. Tipologi-tipologi yang dibuat oleh Padron ini dapat menghubungkan antara NGOs di tingkat internasional dengan NGOs di tingkat akar rumput, mereka adalah: (1) Institusi Kerjasama Pembangunan Internasional (IDCI); (2) NGO yang asli berasal dari dunia ketiga (NGDRO), dan yang ketiga adalah (3) *grass-roots organization* (GRO). Kebanyakan IDCI berasal dari Utara dan berbentuk organisasi-organisasi yang mengumpulkan sumber daya yang akan ditransfer ke Selatan, sementara NGDOs adalah organisasi yang dibentuk oleh individu-individu yang menerima bayaran atas tugas yang mereka lakukan, dan mereka bersifat privat, nirlaba, dan memiliki badan hukum. Mereka beroperasi melalui proyek-proyek atau pun program pembangunan yang bertujuan menguntungkan masyarakat di atas diri mereka sendiri, dan biasanya pembiayaan

yang didapatkan berasal dari sumber-sumber dari luar dari NGDOs sendiri. Menurut Padron, NGDOs menekankan pada partisipasi populer, dan pembelajaran bersama dibandingkan transfer pengetahuan semata. Organisasi yang berada dalam posisi terdekat adalah GRO, yang berfungsi mensuplai informasi langsung dari dan ke masyarakat. Selanjutnya Padron menyertakan tiga model kerjasama antara NGDOs, IDCI, ataupun GRO (diagram 1). Pada model A, NGDO hanya berfungsi menerima uang dari IDCI dengan sikap: *“let ‘gringos’ give us the money... after all they are just giving us back what was ours”*. Dalam model B, NGDO memposisikan diri sebagai cabang teknis dari GRO yang dianggap memenuhi syarat menerima bantuan asing dengan mengatasnamakan dukungan dari anggota masyarakat; sementara pada Model C, NGDO, IDCI, dan GRO membentuk rekanan dalam kerjasama pembangunan. Tentu saja dalam kasus hubungan antar NGO, model C menjadi model yang terbaik.

Diagram 1  
Tiga Model Hubungan



Sumber: *Journal of Peace Research*<sup>34</sup>

Menurut David Korten<sup>35</sup>, terdapat empat fungsi utama dari pergerakan ini, (1) advokasi mendefinisikan kembali kebijakan-kebijakan, mentransformasikan institusi, dan membantu masyarakat dalam mendefinisikan, menginternalisasi dan mengaktualisasikan visi pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*); (2) pengawasan terhadap sistem; (3) protes yang memfasilitasi rekonsiliasi dengan keadilan; dan, (4) mengimplementasikan program pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang disebutkan oleh Korten, memiliki tiga prinsip dasar, yakni<sup>36</sup>: (1) kedaulatan negara melemah seiring dengan munculnya masyarakat sebagai aktor sosial riil dari perubahan positif; (2) untuk melaksanakan kedaulatan mereka dan pertanggungjawaban atas pembangunan mereka dan komunitasnya, masyarakat harus memiliki kontrol atas sumber daya mereka, dan memiliki akses informasi yang relevan, serta memiliki instrumen untuk memastikan akuntabilitas negara beserta aparaturnya; dan, (3) pihak-pihak yang mendukung pembangunan masyarakat harus mengakui bahwa mereka harus mendukung agenda dan tujuan dari masyarakat dan bukan sebaliknya.

Kemunculan peran *civil society* ini dijelaskan oleh teori-sistem ketiga (*third system-theory*), yang menekankan pada munculnya krisis pembangunan. Krisis ini terjadi secara terus-menerus meliputi sektor-sektor ekonomi, finansial, ekologi, sosial, budaya, ideologi, dan politik. Karena terjadinya krisis ini maka muncullah pergerakan yang berusaha mencari kontrol atas setiap proses yang dinilai mengancam keamanan diri setiap orang<sup>37</sup>. Secara singkat, politik teori-sistem ketiga adalah mengenai peningkatan peranan masyarakat dalam pembuatan keputusan pada semua tingkatan

masyarakat. Hanya melalui partisipasi inilah dapat dipastikan kedaulatan masyarakat.

Alasan lain mengapa *civil society* perlu dilibatkan dalam pembuatan keputusan mengenai penyediaan GPGs adalah keyakinan bahwa *civil society* sifatnya nirlaba, yakni tidak menempatkan keuntungan material sebagai tujuan utama.

Dalam konteks NGOs terlibat dalam penyediaan GPGs tentu yang paling terlibat adalah NGOs internasional (INGOs) karena kemampuan mereka di dalam forum-forum internasional tentu lebih baik dibandingkan NGOs yang tidak pernah keluar dari negaranya. Ann M. Florini<sup>38</sup> mengatakan bahwa definisi *transnational civil society* berasal dari tiga buah konsep. *Pertama*, seperti semua bentuk *civil society*, *transnational civil society* terdiri atas kelompok non-pemerintah dan bukan berbentuk entitas privat yang berorientasi keuntungan. *Kedua*, sifatnya menghubungkan batasan-batasan nasional. *Ketiga*, seperti yang banyak diperlihatkan dari kasus-kasus yang ada, *transnational civil society* memiliki beragam bentuk, terkadang ia bisa berbentuk INGO tunggal dengan keanggotaan individu-individu di berbagai negara, seperti bentuk Transparency International. Dalam kasus lainnya, *transnational civil society* terdiri atas lebih dari sekadar koalisi-koalisi informal antarnegara seperti asosiasi ataupun organisasi seperti International Campaign to Ban Landmines. Dalam melihat aktor transnasional tersebut, terdapat kategori-kategori yang membatasinya, yaitu<sup>39</sup>: (1) harus dapat menjalankan fungsi penting dan berkelanjutan, terutama memiliki pengaruh dalam hubungan antar-negara; (2) harus dipandang berpengaruh, baik besar maupun kecil, oleh pengambil keputusan luar negeri dan turut

mempengaruhi kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan, (3) memiliki derajat kemandirian atau otonomi dalam merumuskan dan menentukan kebijakan atau keputusannya.

Korten, Perlas, dan Shiva<sup>40</sup> mempertentangkan *civil society* dengan kehadiran negara. Mereka beranggapan bahwa dalam pembentukan GPGs, *global civil society* mengemban fungsi penyeimbang bagi kekuatan kekaisaran negara-negara<sup>41</sup>. Dalam pandangan komunitas, dunia adalah sebuah tempat terbaik di mana kesempatan-kesempatan untuk berkreasi dapat direalisasikan melalui kerjasama dan pembagian serta kontrol GPGs yang setara. Sementara pandangan mengenai dunia bagi kekaisaran negara adalah sebuah tempat yang sifatnya 'bermusuhan' dan kompetitif. Dalam konteks kekaisaran aturan pilihan yang ada adalah menjadi pemenang atau pihak yang kalah, mengatur atau di atur. Logika yang mempengaruhi adalah yang terampil, terkuat, dan paling rasional-lah yang dapat memperoleh hak dan kewajiban untuk memperoleh kekuasaan dengan instrumen apapun yang tersedia untuk menciptakan perdamaian dan tatanan dunia. Pandangan ini berpotensi memunculkan sifat otoritarianisme

Dalam menganalisis peran-peran NGO, terdapat beberapa kapabilitas NGO yang tidak dimiliki oleh aktor negara, yaitu<sup>42</sup>: (1) NGO sebagai advokator bagi kapabilitas negara, dengan kemampuannya menjangkau masyarakat terpinggirkan, NGO memiliki kapabilitas yang dapat memberikan publikasi. NGO dapat pula mengawasi program-program yang diterapkan pada masyarakat. Kelebihan ini juga membuat NGO memiliki laporan

yang cukup akurat dan seringkali digunakan oleh aktor negara yang berisik masukan dan kebutuhan masyarakat; dan (2) NGO dapat memotong jalur yang dilalui pemerintah (*bypassing the state*); jalan ini diambil NGO untuk memudahkan penerapan kebijakan, karena tidak semua kebijakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tetapi kelemahannya adalah NGO harus tetap bekerja di bawah aturan yang ditetapkan oleh negara-negara, karena jika tidak maka kekuatan pemerintah akan menghalangi langkah NGO selanjutnya.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebuah IGO yang kerap dianggap sebagai pencerminan pemerintahan dunia (*world governance*), melalui ECOSOC telah memberikan ruangan tersendiri bagi kehadiran NGOs dalam rangka konsultasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 71 Piagam PBB yang menyebutkan:

*"The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with nongovernmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the member of the United Nations concerned"*

Namun ketentuan formal ini tidak berarti menghasilkan perluasan pengaruh INGOs dalam kinerja ECOSOC. Hal ini disebabkan ECOSOC sendiri pada kenyataannya, tidak memainkan peranan penting bagi PBB. Negara-negara miskin dan berkembang lebih menyukai menggunakan forum Majelis Umum karena lebih mudah menarik dukungan dan memunculkan isu-isu baru<sup>43</sup>.

## PENUTUP

Keberadaan GPGs dalam masa globalisasi bersifat paradoks, di satu sisi GPGs seringkali dianggap tidak akan mampu menghadapi globalisasi, namun di sisi lain, GPGs justru muncul sebagai konsep yang menyiratkan harapan akan tatanan yang lebih adil, karena GPGs ini sifatnya tidak didominasi oleh satu isu saja melainkan lintas-isu. Mulai dari isu stabilitas ekonomi, distribusi kebutuhan mendasar, sampai dengan isu keamanan dan hak asasi manusia. Ketimpangan yang ada di dunia, tidak bisa diserahkan kepada pasar bebas semata karena telah terbukti pasar bebas justru semakin melebarkan bentangan perbedaan antara negara miskin dengan negara kaya.

Konsep GPGs masih sangat muda dalam dunia internasional, karenanya belum terdapat wacana-wacana matang mengenai ide kinerja dari GPGs. Belum lagi GPGs terbentuk, telah banyak bermunculan kritik dan pertanyaan mengenai GPGs. Pemikiran mendasar dari tulisan ini, walaupun GPGs banyak diremehkan oleh banyak ahli, tetapi kemiskinan dan ketimpangan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tulisan ini ingin memberikan perenungan kembali mengenai makna *public* yang ada dalam konsep GPGs. Publik yang berarti masyarakat luas, tidak hanya berada di bawah perwakilan negara yang seringkali dianggap tidak representatif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat lokal. Partisipasi *civil society* tidak bisa dianggap sebagai penawar dari segala permasalahan ketimpangan yang ada karena sifat dari GPGs sendiri yang *multi-facet* dan harus dihadapi dengan *front-front* yang berebeda-beda pula. Namun setidaknya partisipasi *civil society* bisa memperbaiki ketimpangan

*publicness* dalam pengambilan keputusan. Peranan *civil socceity* dalam proses GPGs tidak ditujukan untuk mendobrak dan menggantikan peranan negara, namun menjadi pelengkap dan pembantu atas ketidakmampuan negara.

## DAFTAR PUSTAKA:

### Buku

Cosgrove, Carol Ann, dan Kenneth J. Twitchett. *The International Actors: The UN and The EEC*. London: MacMillan, 1970.

Florini, Ann M. (ed.). *The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society*, Carnegie Endowment for International Peace, 2000

Heyzer, Noeleen., et.al. (eds.), *NGO Relations in Asia: Prospects and Challenge for People Centered Development*. New York, St. Martin's Press, Inc., 1995.

Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Kaul, Inge, Isabelle Gurnberg, dan Marc A. Stern, *Global Public Goods: International Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century*. New York, Oxford University Press, 1999.

Kaul, Inge, et.al.(eds.). *Providing Global Public Goods: Managing Globalization*. Executive Summary. New York: Oxford University Press, 2003.

Meyer, Thomas. *Demokrasi Sosial Modern Globalisasi dan Regionalisasi*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2002.

Princen, Thomas, Matthias Finger (eds.), *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*. New York: Routledge, 1994.

Riker, James V., Antonio B. Quizon (eds.), *International Organization: A Comparative Approach*. New York: Praeger Publisher 1983.

### Terbitan Berkala (Jurnal)

*Global*. Volume 5 Nomor 1 November 2002.

*Journal of Peace Research*. Volume 27, Nomor 2 1990.

*PS: Political Science and Politics*, Volume 32, Issue 4.

*The American Economic Review*, Volume 76, Issue 1, Maret 1996.

*UN Chronicle*, Volume XXXIX Nomor 2, Juni Agustus 2002.

### Terbitan Khusus

Gardiner Rosalie, Katell Le Goulven. "Sustaining Our Global Public Goods," *Briefing Paper*. World Summit 2002, Johannesburg.

Korten, David C., Nicanor Perlas, dan Vandana Shiva. "Global Civil Society: The Path Ahead," *Discussion Paper* 20 November 2002.

Sandler, Todd, "On Financing Global and International Public Goods," *Policy Research Working Paper*, the World Bank Economic Policy and Prospect Group, July 2001.

### Situs Internet

[www.cato.org/cgi-bin/scripts/printtech.cgi/dailiys/01-01-99](http://www.cato.org/cgi-bin/scripts/printtech.cgi/dailiys/01-01-99).

[www.endgenocide.org/genocide/index.html](http://www.endgenocide.org/genocide/index.html).

[www.fabianglobalforum/forum/article00.html](http://www.fabianglobalforum/forum/article00.html).

[www.libertarianism.org/ex-8.html](http://www.libertarianism.org/ex-8.html).

[www.sussex.ac.uk/Users/hafa2/socdem.htm](http://www.sussex.ac.uk/Users/hafa2/socdem.htm).

[www.twinside.org.sg/title/seek-cn.htm](http://www.twinside.org.sg/title/seek-cn.htm).

### CATATAN BELAKANG

1. Riza Primahendra, "Pembangunan Berkelanjutan dan Peran Masyarakat Sipil," *Global* Volume 5 Nomor 1 November 2002, hlm. 10.

2. "Children 2002: Charting Change," dalam *UN Chronicle*, Volume XXXIX Nomor 2, Juni-Agustus 2002, hlm. 40-41.

3. Lihat website yang dibuat oleh World Federalist Association (WFA), di [www.endgenocide.org/genocide/index.html](http://www.endgenocide.org/genocide/index.html), diakses tanggal 23 Maret 2003.

4. Lihat Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai: Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 87 mengutip *Jurnal Magister Hukum* No. 11, Volume 6 Tahun 1999.

5. Disarikan dari kuliah terbuka Thomas Meyer, "Civil Society, Sosial Demokrat dan Proses Politik: Kaitannya dengan Masa Transisi Indonesia," FISIP Universitas Indonesia, 9 April 2003.

6. Charles P. Kindleberger, "International Public Goods without International Government," *The American Economic Review*, Volume 76, Issue 1, Maret 1996, hlm.2.

7. *Ibid.*, hlm. 23.

8. *Ibid.*, hlm. 24.

9. Martin Shaw, "The Deep Challenge of Global Social Democracy,"

[www.fabianglobalforum.net/forum/article001.html](http://www.fabianglobalforum.net/forum/article001.html) diakses tanggal 30 April 2003.

ajang konflik dan kekacauan. Unjuk rasa massal di Genoa pada 2001 bahkan memakan korban ketika seorang demonstran meninggal dunia dan menurut Stiglitz ini mungkin merupakan permulaan dari gerakan antiglobalisasi yang lebih besar dan akan memakan banyak korban.<sup>2</sup>

Inti dari gerakan sosial dan masyarakat sipil<sup>3</sup> adalah menentang kekuasaan korporasi global (*multinational corporations/MNC*) yang semakin besar<sup>4</sup> dan gagasan tunggal bahwa globalisasi ekonomi adalah satu-satunya cara menuju kesejahteraan. Lembaga internasional seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF dianggap sebagai pengejawantahan dari globalisasi ekonomi dan wahana yang memperkuat dominasi MNC tersebut. Karena itulah protes global hampir selalu dilakukan berkaitan dengan sidang-sidang lembaga tersebut. Protes massal itu sering ditangani dengan kekerasan.

Pada tingkat wacana, para pendukung globalisasi ekonomi mengatakan dua hal utama. *Pertama*, bahwa memang globalisasi ekonomi pasar adalah satu-satunya jalan atau TINA (*there is no alternative*—tidak ada alternatif). *Kedua*, para pengunjuk rasa dan pengkritisi globalisasi tidak memberikan alternatif. Buku ini menjawab kedua tuduhan itu dengan menyajikan kritik atas globalisasi korporat, kemudian prinsip bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, dan diakhiri dengan memberikan alternatif pada tingkat operasional serta alternatif kelembagaan.

Yang menarik, buku ini disusun berdasarkan laporan *drafting committee* pada Alternatives Task Force dari International Forum on Globalization<sup>5</sup>. *Task force* itu sendiri terdiri dari 19 orang dari berbagai

kalangan dan diketuai bersama oleh John Cavanagh (Direktur Institute for Policy Studies) serta Jerry Meander (Ketua Dewan IFG). Dalam pendahuluan buku ini, diakui bahwa mencapai konsensus mengenai isu dan analisisnya di antara ke-19 orang tersebut ternyata lebih sulit dibandingkan dengan merangkai hal-hal yang mereka tentang. Artinya mencapai kesepakatan mengenai alternatif lebih sulit ketimbang mengorganisasikan dan mengartikulasikan protes serta kritik terhadap globalisasi. Karena itu, para penulis tidak berpretensi bahwa semuanya sepakat dengan apa yang ditulis dalam buku itu, tetapi mereka sepakat mengenai arah argumentasi yang disajikan. Dan, mereka bersepakat bahwa ada banyak alternatif, ada banyak kemungkinan untuk menentang dominasi kekuasaan korporasi global. Dan itulah inti pesan buku ini.

Pada bagian pertama, buku ini mengajukan kritik terhadap model globalisasi yang sudah ada selama lima abad berdasarkan ciri-ciri utamanya. Para pendukung globalisasi ekonomi sering menyatakan bahwa hal tersebut tidak terelakkan karena kekuatan ekonomi dan teknologi yang mendorongnya. Tetapi dari beberapa ciri yang diuraikan, jelas bahwa globalisasi bukanlah suatu evolusi alami namun diciptakan oleh manusia untuk memenuhi satu tujuan yaitu mengutamakan nilai ekonomi (baca: ekonomi korporasi) di atas semua nilai lain dan kemudian memaksakan agar nilai tersebut dijadikan peraturan atau hukum global.

Ciri pertama adalah pertumbuhan hiper (*hypergrowth*) yang dicapai dengan selalu mencari sumber daya dan pasar yang baru, serta tenaga kerja yang baru dan murah. Hal ini akan dicapai jika korporasi

dideregulasi, artinya dibebaskan dari segala peraturan, sementara negara dan pemerintah dihadapkan pada berbagai peraturan dan hambatan. Privatisasi dan komodifikasi adalah ciri berikutnya. Untuk meraih laba sebesar-besarnya, semua aspek kehidupan harus diprivatisasi dan dijadikan komoditas, tidak terkecuali air, benih, pelayanan kesehatan dan bahkan uang. Berikutnya adalah homogenisasi ekonomi dan kultural di mana masyarakat dipaksa menganut rasa, nilai dan gaya hidup yang sama—monokultur global. Hal ini terlihat dari monokulturasi cara orang berpakaian, makan di restoran cepat saji, menikmati film dan musik yang sama. Ciri berikutnya adalah pola perdagangan dan investasi yang berorientasi ekspor sehingga mengabaikan potensi ekonomi nasional dan lokal.

Para pendukung globalisasi mengatakan bahwa pola ekonomi yang disebutkan di atas adalah jalan mengentaskan kemiskinan; para kritikus—termasuk penulis buku ini—mengatakan jelas ada tanda-tanda bahwa globalisasi ekonomi ini tidak adil dan justru meningkatkan kemiskinan. Masalahnya adalah bahwa kegagalan eksperimen globalisasi tidak dipaparkan di dalam media, karena media arus utama juga sudah dikooptasi korporasi. Selain itu, para birokrat internasional, yaitu Bank Dunia, IMF, dan WTO sering ‘menyembunyikan’ kegagalan ini dalam retorika dan tetap memaksakan pola kebijakan ekonomi tersebut pada negara sedang berkembang.

Setelah mengupas masalah globalisasi ekonomi, buku ini menyajikan usulan alternatif pada tiga tingkatan yaitu konsep, sistem operasional, dan kelembagaan. Untuk konsep diajukan tiga hal. *Pertama*

adalah prinsip-prinsip untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan; *kedua* mendefinisikan milik bersama (*commons*) dan mana yang tidak boleh disentuh oleh globalisasi; dan, *ketiga* berkaitan dengan konsep subsidiaritas yaitu mengutamakan kepentingan lokal daripada global.

Ada sepuluh prinsip untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan yang disebutkan buku ini. *Pertama*, demokrasi baru atau demokrasi hidup, yaitu demokrasi yang bukan sekedar disetarakan dengan pemilihan umum, tetapi menghidupkan kembali hak masyarakat untuk meminta pemerintah bertanggung jawab kepada mereka, bukan lagi kepada perusahaan global. *Kedua*, subsidiaritas yaitu hak masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pembuatan keputusan di tingkat lokal, pengelolaan sumber daya di tingkat lokal dan keswadayaan di tingkat lokal serta nasional. *Ketiga* adalah keberlanjutan ekologi, sebuah wacana yang sudah kerap diajukan. *Keempat*, warisan bersama, yaitu sumber daya yang harus dibagi bersama secara adil; ada tiga kategori: sumber daya alam (air, hutan, lahan, benih, dan sebagainya), pengetahuan, dan kebudayaan, dan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, listrik). Prinsip *kelima* adalah keanekaragaman, berkaitan dengan dihormatinya semua sistem yang ada, dan tidak memaksakan satu sistem pada seluruh dunia. *Keenam*, asasi manusia, kembali merupakan wacana yang sudah dikenal umum. Prinsip *ketujuh* adalah pekerjaan, penghidupan dan lapangan kerja. *Kedelapan*, keamanan dan ketahanan pangan. *Kedua* prinsip terakhir ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia. *Kesembilan*, keadilan sosial baik di dalam negeri maupun antar negara. *Kesepuluh*

10. Menurut Kaul et.al., public goods bukanlah elemen tunggal dalam domain publik. Di antara hal-hal lainnya, hubungan antarindividu, antarkelompok juga menentukan karakter dari lingkup publik ini. 11. *Ibid.*
12. *Ibid.*, hlm. 12.
13. Rosalie Gardiner dan Katell Le Goulven, "Sustaining Our Global Public Goods," *Briefing Paper*, World Summit 2002, Johannesburg.
14. Todd Sandler, On Financing Global and International Public Goods, *Policy Research Working Paper* 2638, The World Bank, Economic Policy and Prospects Group, Juli 2001.
15. Inge Kaul, Isabelle Gurnberg, dan Marc A. Stern, "Defining Global Public Goods," dalam Inge Kaul, Isabelle Gurnberg, Marc A. Stern, *Global Public Goods: International Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 5-6.
16. World Commission of Environment and Development, 1987, hlm 43. Lihat juga Paul Wapner, "Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civil Politic," Volume 43, Issue No. 3, April 1997, hlm. 321.
17. Gardiner dan Le Goulven, *Op.cit.*, hlm. 7.
18. Kaul, et.al., *Op.cit.*, hlm. 19.
19. *Ibid.*, hlm. 52-53.
20. Dyna Arhin-Tenkorang dan Pedro Conceicao, "Beyond Communicable Disease Control: Health in Age of Globalization," dikutip dalam Kaul, et.al., *op.cit.*, hlm 52.
21. Scott Berrett, "Creating Incentives for Cooperation: Strategic Choices," seperti yang dikutip Kaul, et.al., *op.cit.*, hlm. 53.
22. Lihat Thomas Meyer dalam Kuliah Terbuka Pacivis FISIP UI, 9 April 2003.
23. Dikutip oleh Thalif Deen, UN Seeks Global Plan to fight Poverty, diakses dari situs Third World Network, <http://www.twinside.org.sg/title/seekscn.htm> tanggal 3 Mei 2003.
24. *Ibid.*
25. Kaul., et.al., *op.cit.*, hlm. 41.
26. *Ibid.*, hlm 42.
27. Kenneth N. Waltz, "Globalization and Governance," *PS: Political Science and Politics*, Volume 32, Issue 4.
28. Globalization Widens the Rich – Poor Gap, Third World Network, *Briefing Paper*, diakses dari situs TWN di <http://www.twinside.org.sg/title/rich-ch.htm> tanggal 3 Mei 2003.
29. Waltz, *op.cit.*, hlm. 694.
30. Kaul, et.al., *op.cit.*, hlm. 30 atau lihat juga Gardiner dan Le Goulven, *op.cit.*, hlm. 5.
31. *Ibid.*
32. Chadwick F. Alger, "Grass-roots Perspectives on Global Policies for Development," *Journal of Peace Research*, Volume 27, No.2, 1990, hlm. 155–168.
33. Mario Padron, "Non-governmental Development Organization: From Development Aid to Development Cooperation," *World Development*, Volume 15, Supplement, hlm. 69-77, seperti yang dikutip oleh Alger, *ibid.*, hlm. 158.
34. *Ibid.*
35. *Ibid.*
36. *Ibid.*, hlm. 8-59.
37. Matthias Finger, "NGOs and Transformation: Beyond Social Movement Theory," dalam *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*, Thomas Princen dan Matthias Finger, (London: Routledge, 1994), hlm. 57m
38. Ann M. Florini (ed.), *The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society*, Carnegie Endowment for International Peace, 2000, hlm. 7-8.
39. Carol Ann Cosgrove dan Kenneth J. Twitchett, *The International Actors: The UN and The EEC*, (London: MacMillan, 1970).
40. David C. Korten, Nicanor Perlas, dan Vandana Shiva, "Global Civil Society: The Path Ahead", *Discussion Paper* 20 November 2002.
41. Korten, Perlas dan Shiva menggunakan istilah *empire* (kekaisaran) untuk menjelaskan konsep negara, sementara untuk *civil society* digunakan istilah *community* dalam konteks GPGs.
42. James V. Riker, "Contending Perspectives for Intepreting Government – NGO Relations in South and Southeast Asia: Constraints, Challenges, and the Search for Common Ground in Rural Development," dalam *Government – NGO Relations in Asia: Prospects and Challenges for People – Centered Development*, Noeleen Heyzer, James V. Riker, Antonio B. Quizon (eds.), (New York: St. Martin's Press, Inc., 1995), hlm. 20-22.
43. Werner J. Feld, dan Robert S. Jordan, *International Organizations: A Comparative Approach*, (New York: Praeger Publisher, 1983), hlm. 227.